



Dampak Kebijakan terhadap Aktivitas Pedagang dan Juru Parkir Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Parkir Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta

Samuel Aron Jedyjah Makmur^{1*}, Muhammad Izzudin Aprilian²,
Fransisca Dea Yulianti³, Henggarintyas Trihandari Damayanti⁴

Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta

Korespondensi penulis: aaron.makmur@gmail.com¹

Abstract: *The purpose of this research is to determine the impact of the policy to convert the Abu Bakar Ali (ABA) parking area toward vendors and parking attendants. The data collection technique used was descriptive qualitative research, obtained from in-depth interviews with vendors and parking attendants and observations at the relocation site of the Malioboro Abu Bakar Ali 2 Parking Area. The Abu Bakar Ali parking lot conversion policy was an effort by the Yogyakarta City Government to improve the aesthetics of the Malioboro area and preserve cultural heritage. The findings reveal a significant gap between the environmental and cultural objectives of the policy and the socio-economic reality, with low tourist visitation to the new location resulting in a drastic decrease in income, leading to resentment among vendors and parking attendants. Therefore, the Yogyakarta City Government needs to review the implementation of this policy so that it does not lead to horizontal conflicts between the government and the vendors and parking attendants..*

Keywords: *Conversion of Parking Lot, Policy Impact, Vendors, Parking Attendants.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali (ABA) terhadap pedagang serta juru parkir. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam dengan pedagang dan juru parkir dan observasi di lokasi relokasi Area Parkir Malioboro Abu Bakar Ali 2. Kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali sebagai upaya Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan estetika area Malioboro dan melestarikan warisan budaya. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan antara tujuan kebijakan yang berorientasi lingkungan dan kultural dengan realitas sosio-ekonomi, rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke lokasi baru, mengakibatkan penurunan pendapatan drastis, berujung pada penolakan dari pihak pedagang dan juru parkir. Dengan demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta harus meninjau kembali pelaksanaan kebijakan ini agar kebijakan tidak menimbulkan konflik horizontal antara pemerintah dengan pihak pedagang dan juru parkir.

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan Parkir, Dampak Kebijakan, Pedagang, Juru Parkir.

1. LATAR BELAKANG

Yogyakarta dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan pariwisata terkemuka di Indonesia, terus mengalami kenaikan kunjungan wisatawan yang pesat, terutama di kawasan strategis seperti Malioboro. Pertambahan kunjungan wisatawan membawa konsekuensi pada peningkatan kepadatan lalu lintas, polusi, dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang signifikan. Sebagai respons terhadap tekanan urbanisasi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menata ulang wajah kota melalui kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan dan humanisme. Penataan ini tidak hanya bertujuan untuk mempercantik estetika kota, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi ruang publik yang inklusif dan ramah lingkungan.

Upaya penataan kawasan Malioboro tidak dapat dilepaskan dari status Yogyakarta yang memiliki "Sumbu Filosofis," sebuah garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Pal Putih, Kraton, Panggung Krapyak, hingga Laut Selatan, yang kini telah diakui sebagai

warisan budaya dunia. Pelestarian Sumbu Filosofis menuntut adanya pengendalian pembangunan fisik dan peningkatan kualitas visual serta lingkungan di sepanjang kawasan tersebut. Dalam kerangka pelestarian ini, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi instrumen vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem mikro, mereduksi efek urban heat island, dan memperkuat karakter sumbu filosofis.

Realisasi dari komitmen tersebut tertuang dalam suatu kebijakan, yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Malioboro. Regulasi ini secara spesifik merencanakan pengembangan dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau dengan luas kawasan kurang lebih 84,9 (delapan puluh empat koma sembilan) hektare yang terbagi menjadi beberapa koridor, diantaranya koridor utama, koridor sirip, dan koridor pelingkup. Koridor utama meliputi Jalan Pasar Kembang hingga Jalan Abu Bakar Ali. Jalan Abu Bakar Ali memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utara menuju Malioboro dan berada tepat di lintasan rel kereta api yang ikonik. Salah satu objek vital yang menjadi sasaran implementasi kebijakan tata laksana RTH ini adalah area yang sebelumnya berfungsi sebagai Lahan Parkir Abu Bakar Ali.

Peralihan fungsi lahan dari fasilitas parkir menjadi Ruang Terbuka Hijau merupakan langkah progresif secara lingkungan, namun membawa implikasi sosiologis dan ekonomis yang kompleks. Lahan Parkir Abu Bakar Ali bukan sekadar ruang kosong tempat menaruh kendaraan; telah menjelma menjadi ekosistem ekonomi tersendiri. Transformasi fisik kawasan ini secara otomatis memutus rantai pasok dan pola interaksi yang sudah terbentuk lama. Dampak yang paling dirasakan dari kebijakan alih fungsi ini tertuju pada dua kelompok rentan, yaitu para pedagang dan para juru parkir. Bagi para juru parkir yang biasa beroperasi di sekitar area parkir. Lahan Parkir Abu Bakar Ali adalah tempat kerja dan sumber pendapatan utama; hilangnya lahan parkir berarti hilangnya mata pencaharian secara instan. Keberadaan parkir merupakan magnet yang mendatangkan konsumen potensial, yakni wisatawan yang baru turun dari kendaraan atau yang hendak meninggalkan Malioboro. Relokasi atau penutupan lahan parkir memaksa kelompok ini menghadapi ketidakpastian pendapatan, penurunan omzet yang drastis, hingga kebingungan mencari lokasi usaha baru yang sama strategisnya. Ketidaksiapan mitigasi dalam penerapan kebijakan yang memprioritaskan aspek ekologis berpotensi memicu konflik horizontal di tengah upaya pemerintah menata kota.

2. KAJIAN TEORITIS

Dampak Kebijakan

Secara umum, dampak didefinisikan sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas. Aktivitas ini dapat bersifat alamiah atau dilakukan oleh manusia, dan dampaknya dapat berupa perubahan biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya (Soemarwoto dalam Ismail, L, 2020). Menurut Anderson dalam (Fatmariyanti, Y & Fauzi, A, 2023) kebijakan publik dalam implementasinya akan menimbulkan dampak berupa perubahan yang memang diharapkan terjadi akibat kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Tetapi juga bisa sebaliknya, yakni perubahan yang tidak memberikan manfaat dan tidak diharapkan terjadi.

Analisis kebijakan publik dapat diklasifikasikan berdasarkan kajian sebelum adanya kebijakan dan sesudah adanya kebijakan. Analisis yang dilakukan sebelum berfokus murni pada permasalahan publik, dan hasilnya berupa rekomendasi kebijakan publik. Meskipun berbeda dalam fokus waktu, kedua tipe analisis ini memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada penentu kebijakan agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas (William Dunn dalam Fatmariyanti, Y & Fauzi, A, 2023).

Evaluasi kebijakan merupakan proses menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil suatu kebijakan (Suharso dalam Zakirin, M & Arifin, J, 2022). Evaluasi berfungsi menyajikan informasi yang valid dan terpercaya tentang kinerja kebijakan, evaluasi berkontribusi dalam klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari penetapan tujuan dan target kebijakan, evaluasi turut menyumbang pada perumusan ulang masalah dan rekomendasi kebijakan (Arikunto dalam Zakirin, M & Arifin, J, 2022).

Menurut William Dunn dalam (Mokoginta, E, dkk, 2021) terdapat tiga evaluasi dampak kebijakan. Pertama, dampak ekonomi, yang mencakup perubahan-perubahan yang memengaruhi aspek finansial seperti penghasilan dan nilai tambah. Kedua, dampak pada proses pembuatan kebijakan, yang melihat pada konsekuensi kebijakan saat ini terhadap tindakan atau kebijakan yang akan dilakukan berikutnya. Ketiga, dampak pada sikap publik, yang mengukur perubahan dukungan masyarakat terhadap pemerintah atau program tertentu yang sedang berjalan.

Pedagang

Pedagang didefinisikan sebagai individu yang melakukan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari, di mana aktivitas utamanya adalah memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Inti dari perbuatan

perniagaan ini pada umumnya adalah tindakan pembelian barang untuk dijual kembali (Sari N, 2018).

Menurut Katarudin, dkk dalam (Arifin, S. B, 2023) pedagang dapat digolongkan dalam beberapa jenis.

a. Pedagang besar

Pedagang besar atau distributor adalah pihak yang memperoleh produk barang dagangan langsung dari produsen atau tangan pertama. Biasanya memiliki hak wewenang atas wilayah atau daerah tertentu oleh produsen.

b. Pedagang menengah

Pedagang menengah atau agen adalah pedagang yang mendapatkan atau membeli barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal. Agen biasanya diberi daerah kekuasaan perdagangan tertentu, tetapi cakupannya lebih kecil daripada daerah kekuasaan distributor.

c. Pedagang kecil

Pedagang yang lebih dikenal dengan sebutan pengecer ini menjual barang dagangan langsung kepada pemakai akhir atau konsumen. Penjualan yang dilakukan biasanya dalam jumlah satuan atau eceran.

Juru Parkir

Juru Parkir atau jukir adalah individu yang bertanggung jawab membantu mengatur dan menertibkan arus keluar masuk kendaraan di area parkir yang telah ditentukan. Selain fungsi pengaturan ini, Jukir juga bertugas memungut biaya parkir dan menyerahkan karcis kepada pengguna jasa parkir saat mereka hendak meninggalkan lahan parkir tersebut (Elfira, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sahir H. S (2021) penelitian kualitatif dapat dikatakan baik jika memiliki data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi literatur untuk menggabungkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, berita, dan artikel atau tulisan-tulisan ilmiah. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada obyek utama penelitian, yakni pedagang dan juru parkir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak dilaksanakan pada bulan Juni lalu, alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali telah membawa dampak signifikan terhadap para pedagang dan juru parkir yang menggantungkan nasibnya pada keramaian di lahan parkir tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dalam bentuk dampak finansial, dampak pada proses pembuatan kebijakan, dan dampak pada sikap publik.

Dampak Finansial

Sebelum kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali diberlakukan, para pedagang dan juru parkir menikmati stabilitas dan kepastian pendapatan. Lokasi lahan parkir yang sangat strategis, berdekatan dengan Malioboro menciptakan ekosistem ekonomi mikro yang sehat dan berkelanjutan. Namun, pasca-implementasi kebijakan, lokasi parkir baru tampak sepi sehingga terjadi penurunan pendapatan drastis. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Yatim (51 Tahun, juru parkir di Area Parkir Malioboro Abu Bakar Ali 2).

"Perbandingannya jauh, dulu kalo rame bisa saya bawa pulang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sekarang boro-boro mas, lah wong sepi gini kok. Ini pun ramenanya cuma Sabtu-Minggu, kadang adalah orang, paling bisa dapet Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ini buat nyambung hidup saya bawa becak" (Wawancara, 4 Desember 2025).

Wakil Ketua Paguyuban Keluarga Besar Abu Bakar Ali, Bapak Agil Suhariyanto menyampaikan bahwa para pedagang beberapa bulan tidak dapat berjualan kepada pihak HarianJogja pada 14 Oktober 2025.

"Benar-benar sepi total karena tidak ada lagi armada bus yang masuk ke tempat kami. Untuk hari-hari libur atau akhir pekan pun kondisinya sama saja, tetap sepi. Bus-bus wisata itu lebih banyak memilih parkir di tempat lain yang lebih dekat ke Malioboro"

Dampak Pada Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan alih fungsi lahan Abu Bakar Ali merupakan bentuk kebijakan *top-down*, adanya prioritas pembangunan kota oleh pihak pemerintah, namun implementasi dan perencanaan relokasi yang belum optimal. Lokasi baru, Area Parkir Malioboro Abu Bakar Ali 2 merupakan lahan bekas Menara Kopi, arus lalu lintas satu arah mengharuskan kendaraan untuk memutar Stadium Kridosono di Jalan Yos Sudarso sebelum mencapai area parkir mengakibatkan lahar parkir kurang diminati sehingga para pengunjung lebih memilih parkir di lokasi lain. Hal ini menunjukkan analisis aspek aksesibilitas dan keberlanjutan ekonomi tidak terlaksana dengan baik. Dari hasil wawancara dengan Bapak Yatim (51 Tahun, juru parkir di Area Parkir Malioboro Abu Bakar Ali 2).

”Disana kan lobby nya dekat dengan jalan raya, disini kan agak masuk, kemungkinan bus-busnya belum tahu jadi susah kalo masuk, katanya ada pengarahan jalur-jalur tapi belum tau juga ini, kalo dulu ini bus sampe full, sekarang hari-hari biasa gada yang datang, paling yang dapat satu-dua itu pun Sabtu-Minggu.” (Wawancara, 4 Desember 2025).

Dampak Pada Sikap Publik

Dibandingkan dengan dulu dengan pendapat yang relatif stabil sehingga merasa aman, kini para pedagang dan juru parkir cenderung kecewa. Dijelaskan oleh Bapak Yatim (51 Tahun, juru parkir di Area Parkir Malioboro Abu Bakar Ali 2).

”Harapan saya pemerintah bisa memperhatikan pedagang disini, ya kecukupan disini sehingga bisa layak hidup”. (Wawancara, 4 Desember 2025).

Dilansir dari berita HarianJogja.com, pihak Paguyuban Keluarga Besar ABA, melalui Bapak Agil Suhariyanto (Wakil Ketua Paguyuban) menyatakan sikap penolakan terhadap ketidakpastian aktivitas usaha di lokasi yang baru.

“Kami selalu patuh pada aturan pemerintah. Kalau diminta pindah, kami manut. Tapi anehnya, justru sekarang kami seperti tidak diperhatikan. Seakan-akan dibiarkan begitu saja tanpa ada langkah nyata dari pemerintah. Kami sudah sepakat dengan para pedagang untuk menempati area sekitar parkiran lama, terutama di sekitar pos Gumatan. Yang penting, pedagang bisa tetap mencari makan. Itu saja.”

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali dari hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan kebijakan yang berorientasi lingkungan dan kultural dengan realitas sosio-ekonomi terhadap para pedagang dan juru parkir. Berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya di mana adanya kepastian pendapatan di lokasi ABA menjamin kesejahteraan ekonomi yang relatif baik. Sebelum kebijakan, kepastian finansial memberikan rasa aman dan kemudahan untuk merencanakan kehidupan. Namun, setelah relokasi terjadi penurunan pengunjung, kondisi area Parkir Malioboro ABA 2 sepi, memicu tekanan ekonomi akibat penurunan pendapatan yang masif. Hal ini disebabkan oleh penempatan di lokasi parkir baru yang tidak strategis sehingga menghadirkan tantangan adaptasi yang berbeda dibandingkan lokasi yang ramai sebelumnya. Dengan hilangnya sumber pendapatan yang andal dan strategis, kualitas kehidupan keluarga para pelaku usaha ini berada dalam ancaman, menciptakan ketegangan sosial dan ekonomi yang memerlukan solusi yang komprehensif dari pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, adapun saran yang diajukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yakni perlu meninjau kembali strategi adaptasi ekonomi dan sosial melalui edukasi lokasi parkir baru yang menargetkan agen perjalanan, operator bus pariwisata, dan wisatawan perorangan serta diperlukan promosi yang terintegrasi mencakup promosi *offline* maupun *online*. Promosi *offline* melalui kegiatan atau *event* seni dan budaya Sedangkan, promosi *online* melalui sosial media Facebook, TikTok, dan Instagram yang bertujuan memperluas jangkauan pengenalan Area Parkir Malioboro Abu Bakar Ali 2 sehingga mengoptimalkan daya beli masyarakat. Selain itu, membangun sebuah daya tarik di sekitar lokasi relokasi, misalnya pusat oleh-oleh, atau pasar tradisional untuk menarik kunjungan ke area tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, S. B. (2023). Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Sinunukan III Kabupaten Mandailing Natal). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Retrieved from <https://etd.uinsyahada.ac.id/9824/>.
- Elfira, N. (2021). Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Juru Parkir Wanita di Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun. *Jurnal Online Mahasiswa*, 8(2), 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/30922/29791>.
- Fatmariyanti, Y & Fauzi, A. (2023). Public Policy By William Dunn: Analysis And Implementation. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 1(1), 1-9. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/3>.
- Firiansyah, I., M, Khoiri., Haldy, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Batam Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Dialektika Publik*, 8(2), 27-39. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v8i2.9448>.
- HarianJogja.com. (2025, Oktober 14). 5 Bulan Seusai Relokas, Jukir-PKL Sebut Tidak Ada Pemasukan. Available at: <https://m.harianjogja.com>, diakses tanggal 30 November 2025.
- Hidayah, F. N., & Roisah, K. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Persaingan Perdagangan Jasa di Bidang Konstruksi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean. *Law Reform*, 13(1), 45-59. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15950>.
- Ifada, N. R. I & Ahdiyana, M. (2023). Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 1(3), 1-19. <https://doi.org/10.21831/joppar.v8i3.21487>.
- Ismail, L. (2020). Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Aspek Sosial Dan Aspek Ekonomi Masyarakat Di Desa Cilampeni Kabupaten Bandung. *Tesis*. Universitas Winaya Mukti Bandung. Retrieved from <https://repo.unwim.ac.id/455/>.
- Isnanda, A & Pambudi, A. (2024). Evaluasi Implementasi Keputusan Walikota Yogyakarta

- Nomor 472 Tahun 2021 di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(6), 30-40. <https://doi.org/10.21831/joppar.v2i6.22576>.
- Kedaulatanrakyat. (2025). Penanda Dimulainya Proses Penataan – 1 Juni, TKP Abu Bakar Ali Akan Dipagar. Available at: <https://yogyakarta.bpk.go.id>, diakses tanggal 30 November 2025.
- Marwiyah, A. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik). Universitas Panca Marga. Available at: <http://repository.upm.ac.id/3995/1/>, diakses tanggal 03 Desember 2025.
- Mokoginta, R., Posumah, J., & Palar, N. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (KINALANG) Pada Era New Normal di Kota Kotamobagu. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110), 1-8. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/36269>.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>.
- Pratama, E. A. & Fadhlurrahman, M. D. (2024). Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Yogyakarta: Penyebab, Dampak dan Strategi Pengendalian. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(6), 1-10. <https://doi.org/10.21831/joppar.v2i6.23041>.
- Rohmawati, I & Harsono, D. (2024). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(4), 1-13. <https://doi.org/10.21831/joppar.v2i4.22257>.
- Safitri, A & Pambudi, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(5), 1-10. <https://doi.org/10.21831/joppar.v2i5.22539>.
- Sahir, H. S. (2021). Metodologi Penelitian. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Sari N. (2018). Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islami. *Dusturiyah*, 8(1), 72-95. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i1.4357>.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3(SE), 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3iSE.2912>.
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 256–271. Retrieved from <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/599>.